

ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait peran badan usaha milik desa (BUMdes) dalam menciptakan kesejahteraan sosial melalui pemberian jaminan sosial kesehatan secara mandiri bagi para pekerjanya. Penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan kewajiban bumdes sebagai pemberi kerja dalam membayar iuran jaman kesehatan nasional (JKN) di kabupaten Sampang. Metode penelitian yang digunakan yaitu melalui pendekatan kualitatif dengan melibatkan wawancara secara langsung pada berbagai pihak terkait BUMdes. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya mayoritas BUMdes di kabupaten Sampang belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab mereka untuk membayar iuran JKN pekerja secara mandiri yang berdampak para pekerja tetap terdaftar sebagai penerima bantuan iuran dari pemerintah PBI JKN. Tentunya hal ini berlawanan dengan semangat kemandirian desa sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undang. Pada penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan pembinaan terhadap BUMdes agar dapat mengolah keuangan secara profesional dan memberikan jaminan hak pekerjanya secara berkelanjutan. Dengan demikian BUMdes mampu berperan secara optimal sebagai agen perubahan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan desa

Kata Kunci : BUMdes, Jaminan Sosial Kesehatan, Kabupaten Sampang

ABSTRACT

This research examines the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in creating social welfare through the independent provision of health social security for their workers. The study focuses on the effectiveness of BUMDes in fulfilling their obligations as employers to pay National Health Insurance (JKN) contributions in Sampang Regency. A qualitative research approach was employed, involving direct interviews with various BUMDes-related stakeholders.

The findings indicate that the majority of BUMDes in Sampang Regency have not fully carried out their responsibility to independently pay JKN contributions for their workers. This results in workers remaining registered as recipients of contribution assistance from the government (PBI JKN), which contradicts the spirit of village independence as stipulated in the prevailing laws and regulations. This research recommends the need for strengthening regulations and providing guidance to BUMDes to enable them to manage finances professionally and sustainably guarantee their workers' rights. By doing so, BUMDes can play an optimal role as agents of change in village economic development and welfare.

Keywords: BUMDes, Health Social Security, Sampang Regency